

## Jalur Puncak II Bakal Dibangun Pemerintah Pusat Tahun 2022

**BANDUNG (IM)-** Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, A Koswara mengatakan, rencana Jalan Puncak II akan dibangun pemerintah pusat. "Sudah diusulkan untuk perencanaan 2022. Eksekusi mudah-mudahan kalau di setuju 2022," kata dia, di Bandung, kemarin.

Koswara mengatakan, pengerjaan rencana Jalur Puncak II sedianya sudah mulai dibangun oleh Kementerian PUPR. Tapi tertunda akibat terganjal kasus suap Bupati Bogor kala itu (sebelum Bupati Ade Yasin). "Sehingga dari Kementerian menunda pekerjaannya. Baru masuk lagi sekarang. Sekarang sudah diusulkan untuk 2022. Kemarin di Rakortek itu kita masukkan ke APBN," kata Koswara.

Koswara mengatakan, pengerjaan jalan Puncak 2 menjadi proyek jalan baru. "Masuk jalan baru, kita dorong ke nasional, ke pusat. Dari Bogor juga sama. Nanti cost sharing antara Kabupaten Bogor, provinsi, dan pusat," kata dia.

Koswara mengatakan, pembagian tugas pengerjaan Jalan Puncak 2 sebelumnya sudah dilakukan. "Dulu juga sebenarnya sudah bagi tugas. Provinsi bagian desain, Kabupaten Bogor bagian tanahnya, konstruksi bagian pusat. Karena dulu ada persoalan, mandeg semua," kata dia.

Koswara mengatakan, desain jalan Puncak 2 sudah rampung. Sebagian tanah juga sudah dibebaskan. "Bogor sebagian besar sudah menyiapkan tanahnya. Kalau di Cianjur itu ada beberapa yang masuk ke kawasan hutan, berarti nanti dengan Kementerian LHK atau Perhutani, bisa

pinjam pakai," kata Koswara. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Barat memutuskan untuk mengusulkan pembangunan rencana Jalan Puncak 2 pada pemerintah pusat. "Tetap diajukan pempow ke pemerintah pusat," kata dia, beberapa waktu lalu.

Ferry mengatakan, pemerintah provinsi sedikitnya akan mengusulkan pada pemerintah pusat untuk membangun Jalur Puncak II sebagai jalan non status. "Jalan non status itu artinya belum ada kejelasan, status (jalan) provinsi, status kabupaten/kota, atau jalan nasional. Itu yang dimintakan ke pemerintah pusat. Nanti setelah dibangun baru ditetapkan statusnya," kata dia.

Ferry mengatakan, pemerintah provinsi dan DPRD sudah menyepakati rencana pembangunan Jalan Puncak 2 tidak dikeluarkan dalam rancangan Perda Perubahan RPJMD 2018-2023 yang sudah diketuk palu. Saat ini rancangan Perubahan RPJMD tersebut sedang menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat sebelum resmi dipergunakan.

Pemerintah provinsi Jawa Barat menginginkan ada sejumlah alternatif jalan untuk mengurangi beban Jalur Puncak Bogor. Dan rencana Jalur Puncak II dirancang bukan satu-satunya jalan alternatif untuk mengurangi beban Jalan Raya Puncak. Alternatif lainnya adalah jalan tol Ciawi-Sukabumi-Cirangiang-Padalarang yang saat ini baru dibangun hingga Cigombong. ● pur

## Organda Jawa Barat Minta Larangan Mudik Ditinjau Ulang

**BANDUNG (IM)-** Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah meninjau ulang larangan mudik Lebaran tahun 2021. Mereka menilai, larangan tersebut cukup memberatkan pelaku usaha transportasi.

Ketua DPD Organda Jabar, Dida Suprianda mengatakan, saat ini kondisi pengusaha angkutan umum di Jawa Barat sangat berat. Dampak tersebut, sudah terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. "Sekarang awak angkutan sudah sangat menjerit, karena kami harus bekerja dengan cara digilir. Sekarang jalan, besok tidak," kata Dida pada diskusi Larangan Mudik yang digelar Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Cafe Hoy, Jalan Halmahera, Kota Bandung, Kamis (8/4).

Awalnya, kata dia, para pengusaha berharap besar pada lebaran tahun ini bisa sedikit meraup pendapatan. Itu didasarkan

pada kondisi saat ini, di mana banyak sektor dilakukan relaksasi. Mereka mulai melakukan aktivitas ekonomi seperti sedia kala, degan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Tapi kenapa mudik masih dilarang. Padahal mudik adalah falsafah masyarakat Indonesia satu tahun sekali. Bagi kami, para pengusaha angkutan, lebaran juga menjadi harapan," beber dia.

Dida mengaku, para pengusaha telah mempersiapkan kelengkapan armada untuk lebaran tahun ini. Dengan harapan armada yang pada tahun 2019 lalu banyak menganggur, tahun ini bisa kembali dioperasikan pada saat angkutan lebaran.

"Tapi kenapa justru dilarang, makanya kami mohon kepada pemerintah pusat, bahwa aturan itu harus ditinjau ulang. Karena merugikan kami. Tinggal untuk pelaksanaan mudik nanti kita tetapkan proses secara ketat," imbu dia. ● pur

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### PANTAU HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT JELANG RAMADAN

Bupati Semarang Ngesti Nugraha (kanan) berdialog dengan pedagang saat pembagian antiseptik tangan (hand sanitizer) serta pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (8/4). Pemkab Semarang akan menstabilkan harga sejumlah kebutuhan pokok jelang bulan Ramadhan yang mulai mengalami kenaikan harga sebesar 10 persen melalui operasi pasar.

### PASCA MURID SMAN 1 LEUWILIANG TERPAPAR COVID-19

## Ombudsman Minta Gubernur Jabar Perintahkan Disdik Hentikan Uji Coba PTM

Satgas Covid Jabar dan Satgas Covid Kabupaten Bogor harusnya sudah memiliki kajian terkait kemampuan pemerintah setempat dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan uji coba PTM ini.

**JAKARTA (IM)-** Kasus terparanya murid SMAN 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor oleh wabah Covid 19, membuat Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jakarta Raya khawatir. Teguh Nugroho, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melihat bahwa kasus terparanya murid saat uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) dianggapnya merupakan fenomena gunung es. "Sejauh ini belum ada swab test antigen atau PCR yang dilakukan kepada seluruh elemen pendukung uji coba PTM yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor" ujar Teguh Nugroho kepada

wartawan, Kamis, (8/4).

Ia menerangkan bahwa sejak awal uji coba PTM telah menduga ada potensi maladministrasi yang dilakukan oleh para pihak pengawas dan pemberi persetujuan uji coba PTM.

"Dalam uji coba PTM ini baik Satgas Penanganan Covid 19 dan Disdik Jawa Barat yang membiarkan Disdik Kabupaten Bogor melampaui kewenangannya memberi persetujuan PTM bagi siswa Menengah atas di Kabupaten Bogor yang merupakan ranah Satgas dan Disdik Jabar," terangnya.

Teguh menuturkan potensi yang sama juga dilakukan oleh Kanwil

Kemenag yang menyetujui PTM di Pendidikan agama Islam masuk kedalam SK Disdik Kabupaten Bogor dan tentu saja Satgas Covid dan Disdik Kabupaten Bogor yang memberi persetujuan pelaksanaan PTM kepada lebih 170 sekolah baik Diksar, Dikmen dan Dik Islam dalam skala luas tanpa memperhitungkan kemampuan mereka dalam proses perencanaan pelaksanaan PTM dan pengawasannya.

"Dugaan maladministrasi dalam tahap perencanaan terlihat dari keputusan untuk menyetujui banyaknya sekolah yang melaksanakan uji coba PTM. Sebagai uji coba 170 lebih sekolah itu angka yang besar. Satgas Covid Jabar dan Satgas Covid Kabupaten Bogor harusnya sudah memiliki kajian terkait kemampuan pemerintah setempat dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan uji coba PTM," tuturnya.

Alumni Universitas Padjajaran (Unpad) ini menjelaskan hal yang paling mudah misalnya, apakah Satgas Penanganan

Covid 19 baik provinsi maupun kabupaten telah memperhitungkan kemampuan anggaran Disdik Jabar, Kanwil Kemenag dan Disdik Kabupaten Bogor dalam melakukan Swab Antigen baik di awal, saat pelaksanaan dan di akhir uji coba PTM guna memastikan adanya indikator yang realible untuk memastikan uji coba PTM tersebut aman.

"Nyatanya, saat kami inspeksi mendadak (Sidak) tidak ada swab antigen yang dilaksanakan baik oleh Disdik Jabar, Kanwil Kemenag maupun Disdik Kabupaten dengan alasan tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan itu.

Potensi penyebaran Covid 19 yang paling mudah terjadi lainnya menurut saya adalah saat siswa melakukan perjalanan dari dan pulang sekolah yang mayoritas menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan umum tanpa dapat memastikan jarak aman antar-siswa di dalam kendaraan umum atau memastikan pelajar tersebut

kembali langsung ke rumah tanpa melakukan aktifitas lain. Harusnya di tahap uji coba PTM pihak sekolah yang menyediakan kendaraan antar seperti bus sekolah saja yang bisa menyelenggarakan uji coba PTM untuk memastikan PTM tersebut aman" jelasnya.

Teguh melanjutkan hal lainnya yang menjadi perhatian Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya adalah kemampuan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten melakukan mitigasi saat PTM menjadi klaster penyebaran covid.

Untuk itu, Ombudsman perwakilan Jakarta Raya meminta Gubernur Jabar memerintahkan Disdik Jabar untuk menghentikan uji coba PTM SMA maupun SMK begitu juga Kanwil Kemenag menghentikan PTM di Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Bogor dan Disdik Kabupaten untuk Pendidikan dasar dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap tata laksana PTM di Kabupaten Bogor. ● pra



IDN/ANTARA

### DAMPAK ANGIN KENCANG DI BANDUNG

Petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (Dpkp3) Kota Bandung mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa mobil di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/4). Sedikitnya lima mobil mengalami rusak akibat tertimpa pohon yang diduga tumbang akibat cuaca angin kencang yang terjadi di Kota Bandung.

## Ada 338 Titik Penyekatan di Jabar untuk Cegah Pemudik

**BANDUNG (IM)-** Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan ada 338 titik penyekatan yang dijaga oleh petugas gabungan (dinas perhubungan, kepolisian, TNI dan Satpol PP) di wilayah Jawa Barat untuk mencegah pemudik dan pemudik dini Lebaran 2021.

"Rencananya akan ada 338 titik di 27 kabupaten kota di Jabar. Jadi itu dijaga oleh petugas gabungan bukan hanya dari Dishub Jabar saja," kata Kabid Perhubungan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Jawa Barat, Iskandar, pada diskusi tentang Larangan Mudik yang dilaksanakan oleh Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Kota Bandung, Kamis (8/4).

Iskandar menuturkan 338 titik penyekatan tersebut di antaranya tersebar di Kabupaten Bogor sebanyak 13 titik dan di Sukabumi sebanyak lima titik.

"Jadi posko titik penyekatan ini memang memerlukan sumber daya manusia yang lumayan banyak karena tadi penyekatan itu kan harus memberhentikan kendaraan. Nah kalau orangnya bukan hanya dari Dishub kan enggak bisa melakukan itu," kata dia.

Selain itu, lanjut Iskandar, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat juga akan melibatkan petugas dari dinas perhubun-

gan kabupaten/kota terkait penjaminan di titik penyekatan tersebut.

"Kita juga akan libatkan Dishub tingkat kabupaten kota dan tentu kita akan ada penamban anggaran. Kita usulkan ke Pemprov Jabar. Apakah anggaran ini ditambahkan karena kita akan melakukan penyekatan," kata dia.

Iskandar mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat soal larangan mudik dengan memaksimalkan sosialisasi tentang larangan mudik Lebaran 2021 sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

"Jadi memang larangan mudik itu dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 sehingga sebelum itu ditetapkan kami sudah turun ke lapangan mensosialisasikan tentang larangan mudik. Jadi kekuatannya di sosialisasi ini untuk pencegahan pemudik dini ini," kata Iskandar.

Ia mengatakan larangan mudik Lebaran 2021 ini bukan saja hanya untuk angkutan umum namun juga untuk kendaraan pribadi. Iskandar berharap masyarakat bisa mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021 karena hal tersebut untuk mengendalikan kasus virus korona di Indonesia. ● pur

## Positif Korona, Murid SMAN 1 Leuwiliang, Diisolasi Mandiri di Tasikmalaya

**LEUWILIANG (IM)-** Dua orang murid SMAN 1 Leuwiliang diswab test PCR atau antigen Kamis pagi, (8/4) setelah kontak erat dengan seorang murid lainnya yang terpapar wabah Covid-19. Dua orang yang siswi dan siswa tersebut sebelumnya dinyatakan reaktif setelah melaksanakan rapid test anti body, namun keduanya tidak mengalami gejala-gejala layaknya pasien Covid-19.

"Dua orang murid hari ini diswab test antigen atau PCR karena hasil rapid test anti body reaktif, selain dua orang murid tersebut, orang tuanya juga diswab test di Puskesmas Leuwiliang," ucap Wakasek Humas SMAN Leuwiliang, Didah Nurhaida kepada wartawan, Kamis.

Ia menerangkan bahwa siswi kelas XI yang terpapar wabah Covid 19 tersebut saat ini berada di Kabupaten Tasikmalaya, ia menjalani isolasi mandiri di rumah orang tuanya. "Kami baru tau kalau siswi tersebut terpapar wabah Covid-19 karena gurunya melpon siswi tersebut sakit apa?... karena sudah dua minggu ia tidak masuk saat sekolah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM)," terangnya.

Didah menuturkan alasan siswi yang terpapar wabah Covid 19 tidak melapor ke pihak dokter karena beranggapan bahwa pasien Covid-19 tidak dikasih

obat oleh dokter dan hanya dilakukan isolasi mandiri.

"Memang kadang dokter yang pasien Covid 19-nya tidak punya penyakit bawaan atau komorbid itu hanya disuruh isolasi mandiri, itu anggapan siswa tersebut tidak melapor ke dokter sekolah," tutur Didah.

Di tempat yang sama, Wakasek Kurikulum SMAN 1 Leuwiliang mengungkapkan bahwa pihak sekolah sebelumnya sudah khawatir terjadinya murid atau siswa yang terpapar wabah Covid-19 saat pelaksanaan uji coba PTM hingga memundurkan pelaksanaan uji coba PTM yang harusnya Senin, (15/3) menjadi Senin, (22/3).

"Kami khawatir karena Kecamatan Leuwiliang pernah menjadi zona merah penyebaran wabah Covid-19, lalu kita tiba bisa menjamin keamanan murid saat pergi-pulangnya. Kekawatiran kami waktu itu akhirnya terjadi dengan terparanya seorang siswi kami," ungkap Nana.

### 3 Pelajar yang Positif

Seperti diketahui, tiga pelajar SMA di Kabupaten Bogor terpar virus korona atau Covid-19 saat menjalani uji coba sekolah tatap muka. Kegiatan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terpaksa dihentikan sebagai upayaantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di satu sekolah ini.

"Iya betul. Ada tiga pelajar

yang positif (Covid-19). Awalnya satu pelajar, setelah ditindaklanjuti ternyata jadi tiga pelajar (yang positif Covid -19). Pelajar positif ini di SMA Leuwiliang," ucap Kasie Pengawasan KCD Tingkat 1 Kabupaten Bogor, Ridwan Mujani saat dikonfirmasi Kamis (8/4).

Ridwan menjelaskan awalnya yang terpapar korona di sekolah tersebut hanya satu orang. Kondisi itu terungkap setelah ada pengakuan dari si pelajar yang hilang rasa dan penciuman. "Kemudian ditindaklanjuti oleh tim Satgas Covid-19 sekolah, diteruskan ke tingkat kecamatan dan dilakukan swab. Dalam hal ini saya kira tim satgas sekolah cukup tanggap ya," ujar Ridwan.

SMA Leuwiliang merupakan salah satu dari 170 sekolah di Kabupaten Bogor yang mengikuti ujicoba PTM. Uji coba digelar sejak 11 Maret 2021 dan berakhir pada 10 April mendatang. Sejak Rabu (7/4), kata Ridwan, proses PTM di SMA Leuwiliang sudah dihentikan sementara.

Proses pembelajaran kembali dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid -19 di sekolah tersebut.

"PTM sementara dihentikan dulu di SMA Leuwiliang. Ada rapat evaluasi hari ini, kita tunggu saja bagaimana kesepakatannya," tutur Ridwan. ● gio



IDN/ANTARA

### PENTAS SOUND OF BOROBUDUR

Gitaris Dewa Budjana (kanan) bersama penyanyi Trie Utami (kedua kiri) menampilkan pertunjukan musik Sound Of Burubudur di Pendopo Omah Mbudur, Desa Jowahan, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (8/4). Sound of Borobudur merupakan kreasi sejumlah seniman musik nasional yang terinspirasi dari relief di dinding Candi Borobudur sekaligus sebagai bentuk ekspresi kekaguman terhadap keunikan dan kemegahan candi tersebut melalui musik.

## Dewan Pendidikan Wanti-wanti Pemkot Bogor Soal PTM

**BOGOR (IM)-** Dewan Pendidikan Kota Bogor memanti-wanti Pemerintah Kota (Pemkot) agar mempersiapkan matang sebelum menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) yang direncanakan pada Mei mendatang. Pernyataan ini menyusul temuan positif Covid-19 pada salah satu siswa SMA di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, saat uji coba sekolah tatap muka.

Ketua Wandik Kota Bogor, Dedy Djumawati Karyadi mengatakan, sebelum Satgas Covid-19 Kota Bogor mengizinkan pelaksanaan PTM bagi sekolah yang sudah siap, harus ada model pembelajaran yang mutlak dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor dan Kantor Cabang Dinas (KCD) Kota Bogor. Seperti, merumuskan pembagian shift untuk siswa yang masuk saat jam pembelajaran. "Jangan sampai terjadi klaster atau penyebaran Covid-19 saat melakukan pembelajaran. Jadi semuanya harus disiapkan secara matang," kata Dedy, Kamis (8/4).

Tak hanya itu, sambung Dedy, potensi penyebaran Covid-19 di angkutan umum juga harus diwaspadai. Tidak hanya saat

masa pembelajaran saja. Sebab, menurutnya tidak semua siswa bisa diantar jemput oleh orang tua saat PTM kembali digelar.

"Ini kan untuk meminimalisir potensi anak-anak bertemu dengan orang lain. Harus diperhatikan ini," ucapnya.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Bogor, Hanafi menuturkan, pihaknya tengah mempersiapkan uji coba PTM secara detail. Hal tersebut dilakukan lantaran menghindari adanya klaster baru di sekolah saat uji coba PTM dilaksanakan. "Kita harus mempersiapkan lebih detail lagi, jangan sampai pas uji coba atau pas PTM sendiri ada klaster baru di sekolah. Makanya itu yang diantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengaku belum bisa menyebutkan, berapa sekolah dari 265 SD dan 125 SMP di Kota Bogor yang sudah siap melaksanakan uji coba PTM. "Belum bisa ngasih, nanti aja persiapannya, yang jelas variasi. Sekarang sedang persiapan infrastruktur mereka dan beberapa kelengkapan yang diperlukan. Kalau sudah semua baru koordinasi ke yang lebih besar dan polling ke orang tua," ujarnya. ● gio

## 38 Kambing Hilang dalam Sebulan, Warga Kota Batu Resah

**BATU (IM)-**Warga Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, resah dengan hilangnya puluhan hewan ternak mereka secara misterius. Tercatat ada 38 ekor kambing raib dalam satu bulan ini dan mengakibatkan para pemilik merugi puluhan juta rupiah.

Salah satu warga RT 2 RW 6, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Puriyanto (57), mengatakan dalam sepekan ini dirinya kehilangan 9 ekor kambing. Pertama sekitar bulan Maret, dan terakhir kali hewan ternaknya hilang pada Jumat (2/4). "Pertama yang hilang 5 ekor lalu 4 ekor, total 9 ekor. Kalau dihitung kerugiannya mencapai Rp 27 juta-an. Soalnya badannya besar-besar," jelas Puriyanto yang akrab dipanggil Dobleh, Kamis (8/4).

Ia mengaku pertama kali mengetahui kambingnya hilang misterius saat akan memberi makan di pagi hari. Ia kaget sebab kambingnya telah raib. Diduga hewan ternak miliknya dicuri.

"Kalau pencurian pertama gak tau saya, tiba-tiba hilang. Yang kedua itu awalnya ada orang mencurigakan mondar-mandir lewat mendengar sepeda motor Honda Beat menggunakan

helm warna merah. Tapi ya tidak mengira, tuhanya pagi sudah hilang kambing saya. Prediksi saya ya orang mondar-mandir itu," ujar dia.

Sayangnya, korban enggan melapor ke polisi. Ia hanya melapor kejadian itu kepada ketua RT 2. Sementara itu hilangnya ternak juga menimpa warga yang lain.

Warga Dusun Jeding, Saimun mengaku kehilangan 11 ekor kambingnya. Yang pertama, dirinya kehilangan 8 ekor kambing dan kemudian 3 ternak.

Begitu juga Supri yang mengaku kehilangan 13 ekor kambing, warga bernama Kasih yang menyebut 3 hewan miliknya hilang, dan Mislan 2 ekor kambing. "Harapan saya ya segera tertangkap, jujur sangat meresahkan warga. Susah-susah ternak eh dicuri," kata dia.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Batu, AKP Jeifson Sitorus mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat atas kehilangan hewan ternak.

"Sejauh ini belum ada laporan dari korban. Coba nanti saya kroscek," janjinya. ● pra